

A. Latar Belakang

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apalagi di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba adalah zat yang di butuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Baik untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah di edarkan secara gelap dan di salahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.¹

Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba sekarang telah menjadi kejahatan yang dapat menembus ke dalam bidang-bidang politik, ekonomi global. Ini terjadi karena kejahatan narkoba telah di kemas ke dalam suatu organisasi yang ketat menjadi suatu sindikat internasional yang bergerak secara terselubung menyangkut tindak kejahatan budi daya ilegal

¹ Badan Narkotika Nasional., Buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (jakarta:2010) hal 47

narkoba termasuk di dalamnya mata rantai jaringan pendistribusian, peredaran hingga pada praktek uang (money laundri).

Untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat.

Narkoba semakin menjadi persoalan yang ramai dibicarakan. Disinyalir banyak kalangan, jaringan pengedaran narkotika semakin meningkat dengan terdeteksi adanya keberadaan sindikat narkotika internasional. Banyak orang telah mendengar nama narkotika, namun banyak orang tidak tahu model barang ini, akibat yang ditimbulkan dan siapa yang akan lebih cepat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Sebagai langkah antisipasi sekaligus mewaspadaai menjangkitnya penyakit sosial ini, sebaiknya kita perlu mencari akar dan menentukan solusi

terbaik agar masyarakat kita tidak dirusakkan oleh narkoba. Sebab kalau tidak, hal ini akan berdampak sangat luas terhadap pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pada sisi lain setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya semua pihak ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperhatikan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Norma dan kaedah yang berlaku dimasyarakat saat ini sudah tidak lagi di patuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, sehingga dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang saat ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut cukup memprihatinkan.

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Baik di ibu kota ataupun di kota-kota kecil salah satunya di kabupaten jenepono. Peredaran narkoba di kabupaten Jeneponto semakin tahun semakin meningkat. Tahun 2011 terdapat 3 kasus, tahun 2012 terdapat

8 kasus dan tahun 2013 terdapat 9 kasus. Maka dari itu sebagai aparat penegak hukum, polres jenepono mempunyai peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang terjadi. Di harapkan secara bertahap dapat secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Sebagian dari mereka mempunyai andil dalam bidang kesehatan yang dapat meracik sendiri obat yang biasanya di gunakan oleh masyarakat setempat. Tapi banyak dari mereka yang menyalahgunakan kecerdasannya tersebut dengan menjual obat-obatan yang seharusnya tidak pantas di konsumsi yang sampai saat ini meresahkan masyarakat yang kurang tau,mana obat-obatan yang pantas di konsumsi dan mana yang tidak. Sebagian dari masyarakat mengeluh dan menyesalkan kejadian tersebut,karena seharusnya obat yang mereka konsumsi dapat menyembuhkan penyakitnya tetapi malah memperburuk keadaan.

Bagi sebagian masyarakat tertentu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki nilai bisnis yang tinggi. Trend perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dari negara transit dan konsumen kini sudah menjadi produsen untuk ekstasi dan shabu. Melihat perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air yang merisaukan dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan tindakan yang sungguh-sungguh dari semua pihak secara terpadu dan berkesinambungan. Keterlibatan masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut, harus ada penanganan yang serius terutama oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Di mana BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. BNN di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka inilah judul yang dipilih untuk diteliti dalam

penelitian. **“Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Jeneponto”**. Untuk mengetahui seberapa besar koordinasi dan kinerja yang di lakukan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam membantu Badan Narkotika Nasional dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan dari Satuan Reserse Narkoba Jeneponto sudah optimal karena dari kasus yang telah ada semuanya terselesaikan dan tidak ada penangguhan perkara.
2. Kendala yang di hadapi dalam pemberantasan narkoba di Jeneponto oleh Satuan Reserse Narkoba Jeneponto yaitu:
 - a. Luas wilayah dan jumlah personil yang tidak seimbang. Artinya personil yang diturunkan dalam pemberantasan narkoba lebih sedikit di bandingkan luas wilayah jeneponto yang begitu luas untuk mengungkap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di beberapa daerah.
 - b. Kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba masih kurang sehingga tidak dapat membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan narkoba.
 - c. Tidak memadainya sarana dan prasarana yang ada sehingga tidak menunjang kinerja satuan reserse narkoba dalam pemberantasan narkoba.

Cara mengatasi hambatan yang ada adalah semakin gencar dalam melakukan razia ke berbagai tempat dan lebih sering melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat lebih mengerti dan tahu tentang narkoba